Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2	0	1	7

SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Kompas	Sindo	Tempo
Indopos	Pos Kota	Warta Kota

RAPBD 2018 Segera Dibahas

Akomodasi Janji Politik, Sebagian Penyertaan Modal Pemerintah Dialihkan

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah daerah dan DPRD DKI Jakarta akhirnya bersepakat mengenai besaran RAPBD DKI 2018, yakni Rp 77,1 triliun. Angka itu membengkak dari rancangan awal Rp 74 triliun. Penambahan anggaran itu terutama untuk mengakomodasi janji politik.

Kesepakatan itu dicapai dalam rapat pembahasan dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI Jakarta 2018, Selasa (14/11).

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan bahwa KUA-PPAS sudah disepakati dan ditandatangani Gubernur, Wakil Gubernur DKI, serta lima pemimpin DPRD DKI. Rabu ini akan dilakukan rapat paripurna untuk membuka pembahasan RAPBD 2018 dan penyampaian visi dan misi Anies-Sandi.

Kesepakatan akan besaran RAPBD 2018 ini telah melalui jalan panjang. Dokumen KUA-PPAS yang merupakan awal dari RAPBD 2018 diserahkan Pemerintah Provinsi DKI kepada DPRD DKI pada Juni 2017 untuk dibahas. Namun, DPRD DKI sempat tidak membahas. DPRD bersurat ke Pemprov DKI pada awal Oktober, meminta supaya program yang disusun mengakomodasi 23 janji politik Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno.

Setelah dilantik, Anies meminta Bappeda menyisir ulang program yang disusun supaya 23 janji politiknya dimasukkan dan dibiayai APBD 2018. Hasilnya, anggaran bertambah dari Rp 74 triliun menjadi Rp 77 triliun.

Untuk membiayai pengeluaran yang membengkak itu, pendapatan asli daerah (PAD) dari pajak yang semula ditargetkan Rp 36 triliun, ditingkatkan menjadi Rp 38 triliun.

"Untuk optimalisasi dari pajak, teman-teman pajak sudah kami tanya beberapa kali, sanggup tidak. Ternyata mereka mengatakan sanggup dengan catatan ada beberapa perda yang harus dibuat terkait dengan retribusi," ujar Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Saefullah.

Kemandirian BUMD

Upaya menekan pengeluaran juga dilakukan Pemprov DKI dengan mengurangi dana penyertaan modal pemerintah (PMP) untuk sejumlah badan usaha milik daerah (BUMD).

Sejumlah BUMD, termasuk BUMD pangan, akhirnya diputuskan tidak mendapatkan PMP di APBD 2018. Alasannya, supaya BUMD mandiri. Anggaran yang tidak jadi digunakan untuk PMP itu lantas dipakai untuk mengakomodasi 23 janji politik.

BUMD yang tidak mendapat PMP tahun 2018 adalah PT Food Station Tjipinang, PD Dharma Jaya, PT Jakarta Tourisindo, PT Pembangunan Sarana Jaya, dan PT Asuransi Bangun Askrida.

PMP untuk PT Jakarta Propertindo dikurangi Rp 1,149 triliun. BUMD yang antara lain ditugasi membangun LRT fase 1 rute Kelapa Gading-Rawamangun ini juga diharuskan mengembalikan anggaran Rp 650 miliar yang tidak jadi digunakan untuk mengakuisisi Palyja.

Direktur Utama PT Jakarta Propertindo Satya Heragandhi mengatakan, pihaknya tidak masalah dengan pemotongan ini. Sebab, dana yang dipotong itu adalah dana untuk pembangunan fase 2 LRT.

Johnny Simanjuntak, anggota Banggar DPRD DKI dari Fraksi PDI-P, mengkritisi tentang BUMD yang tidak mendapat PMP. "Ketika ada gubernur-wakil gubernur baru, seharusnya ada kesinambungan dan akan melanjutkan kebijakan yang baik. Kalau ada yang perlu ditingkatkan, kami mendukung. Namun, ketika bicara tentang Food Station dan BUMD lain, kesan saya, asal beda. Selalu menjadi antitesis dari kebijakan yang lalu," ujar Johnny dalam rapat Banggar besar terakhir.

Yang seharusnya dilihat, ujar Johnny, BUMD tersebut menjadi penyeimbang atau stabilisator di Jakarta.

Bestari Barus, anggota Banggar dari Partai Nasdem, berpendapat, pengenolan PMP, khususnya bagi BUMD pangan, akan membawa dampak yang mengkhawatirkan. "Mereka ini jadi perpanjangan pemprov di saat-saat terjadi lonjakan kebutuhan. Kalau PMP dikurangi, bagaimana pemerintah bisa hadir," ujarnya.

Saat Lebaran lalu, gejolak harga bisa diredam karena adanya stabilisasi harga dan cadangan pangan dari BUMD pangan.

Target PBB

Di Jakarta Utara, Pemerintah Kota Jakarta Utara menggenjot PAD 2017 dengan mengoptimalkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sejumlah 80 wajib pajak yang belum membayar PBB dipasangi stiker dan papan informasi tunggakan pajak daerah di depan bangunan milik wajib pajak itu, Selasa.

Total tunggakan PBB ini mencapai Rp 73,834 miliar. Pemkot Jakarta Utara menargetkan pengumpulan PBB tahun ini mencapai Rp 1,9 triliun.

Kepala Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu Carto menjelaskan, sebelum memasang stiker dan papan, pemerintah telah mengirim surat pemberitahuan kepada wajib pajak dan berdialog agar mereka mau membayar tuggakan pajak.

"Kami juga telah memanggil mereka untuk menandatangani surat kesanggupan membayar pajak," katanya.

Wali Kota Jakarta Utara Husein Murad menegaskan, tujuan dari pemasangan stiker dan papan informasi tunggakan pajak ini untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak yang belum membayarnya.

Dari enam kecamatan di Jakarta Utara, Penjaringan memiliki jumlah penunggak paling banyak, yaitu 29 wajib pajak. Namun, jumlah tunggakan paling banyak ada di Tanjung Priok, yaitu sebesar Rp 38 miliar. Sebagian besar penunggakan dilakukan oleh badan usaha.

(HLN/DD08)

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2	0	1	7

SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Kompas	Sindo	Tempo
Indopos	Pos Kota	Warta Kota
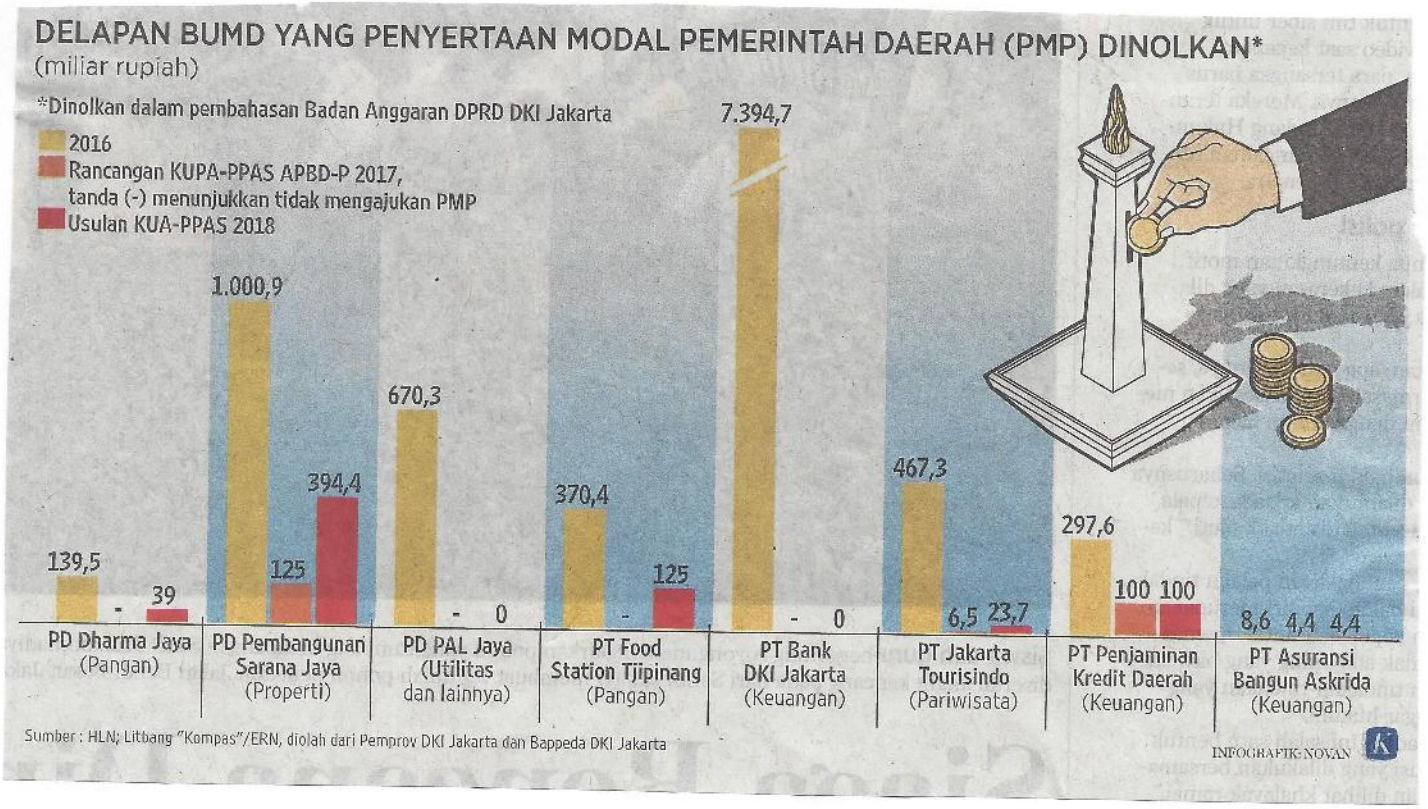
RAPBD 2018 Segera Dibahas